

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pemilik kendaraan wajib membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai syarat kepemilikannya. Salah satu unsur penopang keuangan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak ini. Menurut Handayani (2022), pajak daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah. Berbagai inisiatif yang dapat mendongkrak tingkat pendapatan harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pendapatan melalui pembayaran PKB (Asis, 2017).

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) dan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) Pajak kendaraan bermotor masuk dalam kategori pajak daerah tingkat 1, artinya kewenangan pengelolaannya berada di tangan pemerintah daerah setempat dan pembayarannya langsung disetorkan ke kas daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dalam membiayai pemerintahan serta pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Harefa, 2021). Upayah pemerintah hendaknya berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengatur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pembayaran melalui Samsat Digital, Indomaret, dan dompet digital merupakan contoh inovasi yang akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Agar pemerintah dapat mencapai tujuan pendapatannya dan mencapai manfaat bagi masyarakat,

maka kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu sangat membantu (Marilyn & Ruslim, 2023).

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mempengaruhi pencapaian target PAD. Dalam pemungutan pajak pemerintah juga dihadapkan oleh berbagai tantangan. Memang benar bahwa pemungutan pajak adalah tugas sulit yang melibatkan keterlibatan aktif petugas pajak dan upaya sukarela dari wajib pajak (Asis, 2017). Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam industri pajak kendaraan bermotor dalam upaya mengumpulkan pendapatan adalah kepatuhan dalam pembayaran para wajib pajak (Kurniawati, 2021).

Pemeriksaan penerimaan pajak kendaraan bermotor, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Krian ditemukan data keterlambatan pembayaran yang perlu diakui dan diperhatikan. Data ini mencakup informasi tentang keterlambatan pembayaran pajak dari sejumlah pemilik kendaraan selama 4 periode. Penerimaan dan keterlambatan objek dalam membayar pajak di Kantor Bersama SAMSAT Krian mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan dan keterlambatan di Kantor Bersama SAMSAT Krian
(dalam objek).

TAHUN	PENERIMAAN OBJEK	KETERLAMBATAN OBJEK
2019	1.025.145	159.474
2020	944.725	211.291
2021	954.754	188.219
2022	952.790	198.077

Sumber data: Dokumen Samsat Krian 2023

Tabel 1.1, menunjukkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2022 penerimaan kembali mengalami penurunan. Jumlah keterlambatan pembayaran pajak pada tahun 2020 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman akan penggunaan dana pajak atau ketidakpercayaan terhadap tata kelola pemerintah, rendahnya kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan (Fatmawati & Adi, 2022). Berdasarkan temuan penelitian Barlan (2021), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman seseorang terhadap perpajakan. Oleh karena itu, agar penerimaan pajak dapat memaksimalkan hasilnya, wajib pajak harus bersedia membayar pajak.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa kesuksesan pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengguna, tetapi juga terdapat pada efektivitas sistem administratif dan tata kelola pemerintah yang baik. Kualitas pemerintahan dalam menyediakan layanan diukur dengan efektivitas penghindaran pajak, perlakuan terhadap wajib pajak oleh otoritas pajak, fraksionalisasi etnis, transparansi kelembagaan (korupsi), dan ketimpangan pendapatan (Justicia & Theilen, 2018). Selain itu, penerapan kebijakan yang transparan dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat tentang penggunaan dana pajak dapat membantu membangun kepercayaan dan pemahaman akan manfaat yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan sebelumnya oleh Juwita & Wasif (2020), Widajantie & Anwar (2020) dan Paramita (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya juga melakukan hal serupa dengan judul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)” oleh Fatmawati & Adi (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari (Fatmawati & Adi, 2022). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mereplikasi variabel independen yang ada dalam penelitian terdahulu. Variabel yang ditambahkan yaitu Penerapan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) karena perkembangan digital peneliti tertarik untuk menambahkan variabel tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Krian. Alasan memilih kantor SAMSAT Krian karena penelitian ini mendapatkan hasil observasi bahwa keterlambatan pembayaran pajak di Samsat Krian mengalami fluktuasi. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor yang ditemukan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1. 2 Rumusan Masalah

Penyusunan latar belakang sebelumnya, mendasari penulis dalam memutuskan untuk merumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini. Adapun beberapa rumusan pokok dalam penelitian terdiri dari pertanyaan berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
3. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
5. Apakah penerapan samsat digital nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
4. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
5. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan samsat digital nasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.
6. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

1. 4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan mengolaborasi *theory of planned behavior* adanya pengaruh keperilakuan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Krian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris variabel dependen dalam membuktikan aplikasi *theory of planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat membantu menggali pemahaman tentang bagaimana sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dipersepsikan bekerja Bersama-sama dalam mempengaruhi niat dan perilaku.
3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menginformasikan dan mendukung pembuatan kebijakan yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat secara positif.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah sebagai Fiskus

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang kebijakan pajak yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sistem pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.